

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian.

Gas bumi dikenal sebagai salah satu “*Source of Energy*” yang memiliki beberapa kelebihan, antara lain ramah lingkungan, pembakaran mudah, bersih dan aman serta harga persatuan panas (kalori) lebih murah bila dibandingkan dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) seperti tertera dalam tabel 1.1 di bawah.

Tabel 1.1 : Alasan Menggunakan Gas LPG di kabupaten dan Kota Bandung

Alasan	Persentase (%)
Lebih Praktis	81,2
Lebih Murah	25,5
Lebih Bersih	79,8
Memasak Lebih Cepat	84,0
Mudah Didapat	6,7
Ukurannya Sesuai	14,2
Selalu Tersedia	18,4

Sumber : Laporan Wilayah Regional Jawa Pembangunan Jaringan Moda Distribusi LPG Ditjen Migas 2007

Gas bumi sejak dulu memiliki peran sangat vital dalam pembangunan Indonesia, selain sebagai sumber energi dan sumber bahan baku industri, juga telah memberikan kontribusi bagi penerimaan negara senilai Rp. 31,4 triliun atau sekitar 9,3 % dari total penerimaan dalam negeri. (sumber : DESDM).

Pemanfaatan gas bumi di dalam negeri telah berjalan cukup lama namun selama ini masih terkonsentrasi pada daerah yang dekat dengan sumber gas bumi atau di sekitar fasilitas pipa transmisi yang sudah ada. Seiring dengan bertambahnya kebutuhan akan gas untuk kebutuhan masyarakat dalam negeri merupakan tantangan bagi para pelaku bisnis gas di Indonesia, karena akan cukup banyak tersedia gas yang dapat dimanfaatkan namun belum optimal yang disebabkan infrastruktur gas masih terbatas.

Sebuah kebijakan tidak akan berjalan atau akan mengalami hambatan yang besar jika tidak sejalan dengan atau tidak mampu memahami tujuan organisasi/perusahaan sehingga hal tersebut akan menjadi konteks dari tujuan kebijakan tersebut. Kebijakan yang menurut pembuat kebijakannya memiliki kandungan isi dan tujuan yang baik tetapi tidak akan diterjemahkan yang sama oleh kelompok sasaran jika mengabaikan aspek kontekstual dari lokasi kebijakan tersebut.

Pembangunan infrastruktur harus menjawab permasalahan yang dialami kelas atas, menengah maupun bawah karena jika pembangunan infrastruktur hanya memperhatikan kepentingan kelas atas saja maka kesenjangan sosial dengan kelas lainnya akan semakin lebar karena kelas atas akan memperoleh fasilitas yang lebih besar dan layanan publik yang lebih baik sehingga produktivitas pendapatan kelas bawah dan menengah semakin menurun.

Akses terhadap infrastruktur energi seharusnya dijaga agar kesejahteraan masyarakat dapat terjamin. Kelangsungan program konversi hanya bisa dilaksanakan jika dimulai dari perencanaan dan program pelaksanaannya dibenahi dari sekarang sebelum mengalami kegagalan atau menciptakan dampak yang lebih buruk.

Pemerintah harus lebih cermat dalam menentukan lapisan masyarakat yang akan menjadi sasaran konversi. Jangan sampai pemberian kompor gas gratis dan tabung gas bersubsidi menjadi salah sasaran, bukan diterima oleh masyarakat yang membutuhkan bantuan. Jika kebijakan infrastruktur tepat sasaran dan tepat program, niscaya pendapatan masyarakat akan mengalami kenaikan dan akses mereka terhadap kesejahteraan semakin lebar.

Persoalan infrastruktur energi sejatinya bukan semata persoalan ekonomi namun juga politik, sosial dan budaya. Perencanaan infrastruktur seharusnya dapat membangun objektivitas sehingga dapat berkontribusi dalam pembangunan dengan didasari oleh pengetahuan, bukan sekedar mekanisme pasar.

Simplifikasi persoalan energi hanya sebatas persoalan ekonomi tidak bisa menyelesaikan gejolak di masyarakat yang masih gagap teknologi, walaupun teknologi elpiji diklaim masih sangat sederhana.

Sosialisasi, pelatihan dan jaminan (garansi) yang menjadi keamanan penggunaan elpiji merupakan solusi yang cukup menjawab kekhawatiran masyarakat.

Pemerintah harus mengusahakan program konversi energi dengan menilik kepentingan dan kemampuan semua lapisan masyarakat. Pemerintah harus memahami bahwa masyarakat sebagai subyek pembangunan dalam kenyataannya sangat kompleks dan beragam, dalam arti terhimpun atas dasar berbagai fungsi katagori sosial dan di dalam masyarakat terdapat berbagai kepentingan yang menyebabkan tingkat adaptasi terhadap pembangunan infrastruktur bervariasi.

Kebijakan yang dijalankan sebaiknya juga berkelanjutan, terencana dan tidak bertentangan. Rencana konversi terasa mendadak dan tidak terencana secara komprehensif. Dapat dilihat dari rencana konversi energi yang awalnya menggunakan briket batubara yang dapat memberdayakan masyarakat kecil dalam pembuatan kompor tiba-tiba diganti dengan elpiji yang kompor dan tabungnya hanya dapat diproduksi oleh pabrik besar. Seharusnya kepentingan rakyat kecil lebih diutamakan dari pada kepentingan kapital.

Infrastruktur dapat menstimulir munculnya kegiatan ekonomi atau mendukung berkembangnya dalam suatu kegiatan ekonomi wilayah. Konversi energi yang berbasis pada masyarakat niscaya juga akan meminimalisir konflik dalam masyarakat, efisien serta memberdayakan masyarakat secara ekonomi.

Tetapi kelangkaan untuk membuat rakyat beralih dari menggunakan minyak tanah menjadi menggunakan gas juga dinilai bukan solusi yang elegan karena sangat terburu-buru, tidak melihat kemampuan masyarakat. Kisruh yang terjadi akibat konversi gas menunjukkan fakta bahwa pemerintah tidak memiliki perencanaan dan

implementasi yang baik karena program yang baik semestinya diikuti dengan perencanaan serta implementasi yang baik sehingga bisa memperkecil distorsi. Di sisi lain, masyarakat juga harus lebih dewasa dalam menggunakan energi, tidak memboroskan energi yang disubsidi pemerintah.

Masyarakat harus mandiri, realitis dan tidak terus menerus terlena oleh fasilitas yang selama ini disediakan oleh pemerintah.

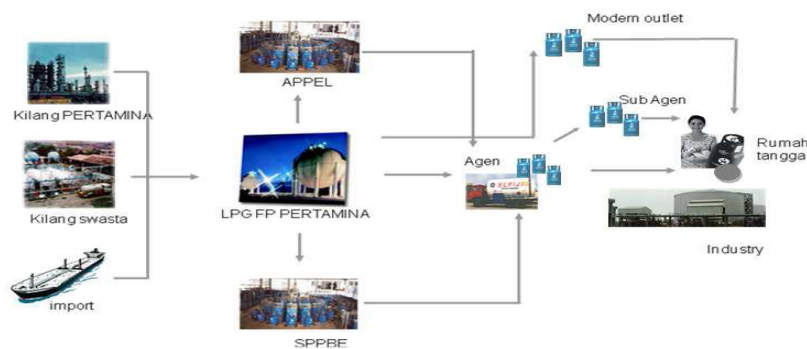
Proses adopsi memang tidak mudah, terlebih energi minyak tanah sudah menjadi kultur selama puluhan tahun. Untuk lebih memudahkan proses adaptasi masyarakat, pemerintah dapat bekerjasama dengan Pertamina dalam mengadakan penyuluhan pada masyarakat grass root serta mewadahi aspirasi masyarakat dengan membuka hotline pelanggan elpiji atau kotak saran.

Jadi, dalam proses konversi masyarakat tidak berjalan sendiri, namun senantiasa didampingi pemerintah dan perusahaan sebagai pihak yang berkompeten.

Persaingan bisnis global saat ini bukan lagi merupakan kompetisi antar perusahaan secara mandiri, tetapi sudah didominasi oleh kompetisi antar *Supply Chain* (Rantai Pasok). Keberhasilan suatu *supply chain* untuk memenangkan kompetisi sangat ditentukan oleh kemampuan *supply chain* untuk memperoleh kepercayaan konsumen akhir, maka sebuah *supply chain* perlu memahami kebutuhan konsumen.

Selain itu, keberhasilan *supply chain* memenuhi tuntutan konsumen juga merupakan salah satu kunci sukses bisnis untuk dapat bertahan (Christopher dan Towill, 2003).

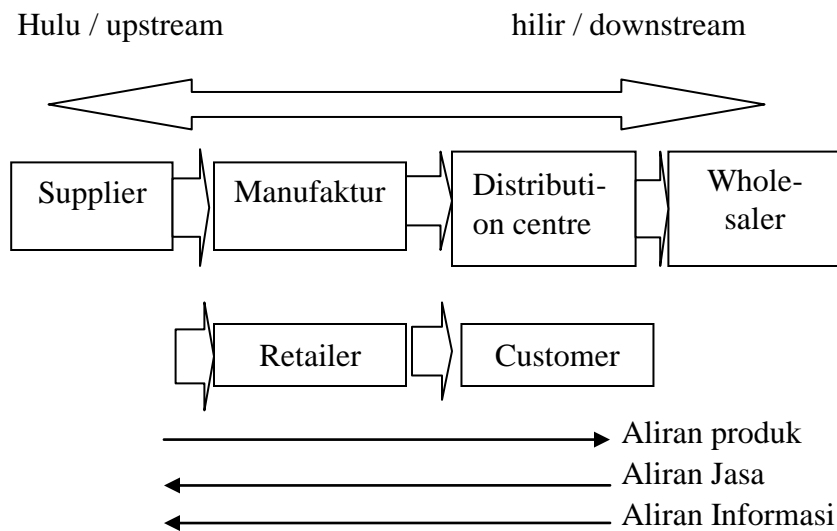
Sedangkan tuntutan konsumen sendiri dapat dirumuskan sebagai kebutuhan untuk memperoleh produk yang tepat dengan harga yang tepat pada waktu yang tepat.



Sumber : Gasdom Pertamina.comm tahun 2008

Gambar1.1 : Sistem Penerimaan dan Distribusi Gas Elpiji

Proses-proses ini tentunya melibatkan berbagai pihak yang berhubungan antara satu dengan lainnya. Sistem distribusi dari pengiriman produk gas elpiji ukuran 3 kg kepada pihak konsumen tidak hanya dilihat dari persoalan pemenuhan kebutuhan konsumen, namun juga dapat dilihat dari sisi lain, misalnya jarak atau rute yang harus di lalui / ditempuh.



Sumber : Grean dan Shwa,2004,

Gambar 1. 2 : Struktur Supply Chain yang disederhanakan

Supaya para pelaku dalam suatu *supply chain* dapat bekerja sama dengan baik untuk memenuhi kebutuhan konsumen sekaligus kebutuhan anggota *supply chain*, maka setiap *supply chain* perlu merumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

Persoalan yang biasanya dihadapi dalam sebuah *supply chain* untuk mencapai tujuan tersebut di atas adalah ketidak mampuan manajemen untuk menentukan strategi yang tepat.

Persaingan yang sangat ketat menuntut para pengelola bisnis untuk menciptakan model-model baru dalam pengelolaan aliran produk dan informasi. *Supply Chain Management (SCM)* adalah modifikasi praktek tradisional dari manajemen logistik yang bersifat adversarial ke arah koordinasi dan kemitraan antar pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan aliran informasi dan produk tersebut.

Prinsip SCM pada dasarnya adalah sinkronisasi dan koordinasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan proses aliran material / produk, baik yang ada dalam satu organisasi maupun antar organisasi. Aliran material/produk dalam satu organisasi misalkan dalam suatu industri manufaktur sangat kompleks, penanganannya membutuhkan campur tangan semua pihak, bukan hanya mereka-mereka yang

dilalui langsung oleh aliran material/ produk secara fisik, tetapi juga bagian-bagian lain (bagian perancangan, pemasaran, akuntansi dsb).

Pada SCM, seluruh bagian harus mampu bekerja sama membentuk sebuah tim yang biasanya dikenal dengan sebutan “ *cross functional team* “, sinkronisasi kegiatan-kegiatan bukan hanya perlu pada bagian-bagian internal organisasi, namun harus mampu melakukan kerja sama dengan pihak luar organisasi.

Oleh sebab itu agar suatu perusahaan ingin mencapai kesuksesan, maka perlu meningkatkan kerja sama dengan pihak luar, bahan baku yang merupakan komponen utama dari hpp (harga pokok produk) sebuah produk diperoleh dari para pemasok/supplier, juga urusan pengiriman bahan baku dari pemasok maupun produk jadi ke para distributor seringkali memanfaatkan jasa pihak lain.

Sejak tahun 2004, Indonesia merupakan salah satu negara produsen minyak dan gas bumi dengan total kebutuhan sebesar 517.524.000 barel, sedangkan disisi lain sejak tahun 2005, Indonesia sebagai konsumen BBM dan Non BBM sebesar 370.968.000 KL yang dapat di pada tabel 1.2 dan 1.3 serta total cadangan pada tabel 1.4

Seiring dengan bertambahnya kebutuhan akan gas untuk kebutuhan masyarakat dalam negeri merupakan tantangan bagi para pelaku bisnis gas di Indonesia, karena akan cukup banyak tersedia gas yang dapat dimanfaatkan namun menghadapi kendala karena infrastruktur gas masih terbatas.

Dan pada masa transisi konversi minyak tanah ke gas elpiji, masih terjadi perbedaan (Gap) antara harapan dan persepsi konsumen.

Hal ini diakibatkan oleh permasalahan yang muncul, yaitu :

1. Kualitas pelayanan :
 - a. Belum meratanya sistem pasokan gas/banyak daerah mengalami kekurangan pasok gas elpiji
 - b. Daerah yang pasokan gas elpijinya normal namun kualitas pelayanan tidak memadai (kurangnya informasi penggunaan elpiji rumah tangga yang benar dan aman; distribusi pembelian/penjualan yang belum terkoordinasi dengan baik; beberapa tabung elpiji kurang memenuhi standar penggunaan dan keselamatan; elpiji harus diperoleh melalui jalur distribusi atau agen yang sudah dikonfirmasi terlebih dahulu tidak seperti minyak tanah yang dapat dibeli seketika melalui pengecer atau penjual keliling secara lebih mudah atau tidak melalui prosedur konfirmasi).

2. Kualitas Produk :
 - a. Kemasan dan kelengkapannya

Sejak dicanangkan konversi ini tahun 2006 sampai sekarang telah terjadi beberapa kali insiden atau kebakaran akibat adanya kesalahan prosedur penggunaan tabung gas elpiji atau kelengkapan valve dan regulator yang tidak sempurna.

- b. Sosialisasi dan pemantauan ke masyarakat (sebagai konsumen rumah tangga) tentang prosedur lengkap penggunaan dan penyimpanan gas elpiji agar insiden ledakan atau kebakaran dapat dihindari.
- c. Kualitas Distribusi :
Elpiji rumah tangga umumnya belum menjangkau tempat-tempat terpencil dengan alasan permintaan belum ekonomis sehingga didaerah tersebut masih sulit memperoleh gas elpiji, sementara minyak tanah sudah langka dipasaran.
- d. Harga : Tabung gas elpiji berukuran 3 kg sudah diberikan secara gratis oleh pemerintah. Elpiji dijual / tabung, yang isinya 3 kg dengan harga berkisar antara Rp. 14.500 – Rp. 15.000., seperti terlihat pada Tabel 1.5



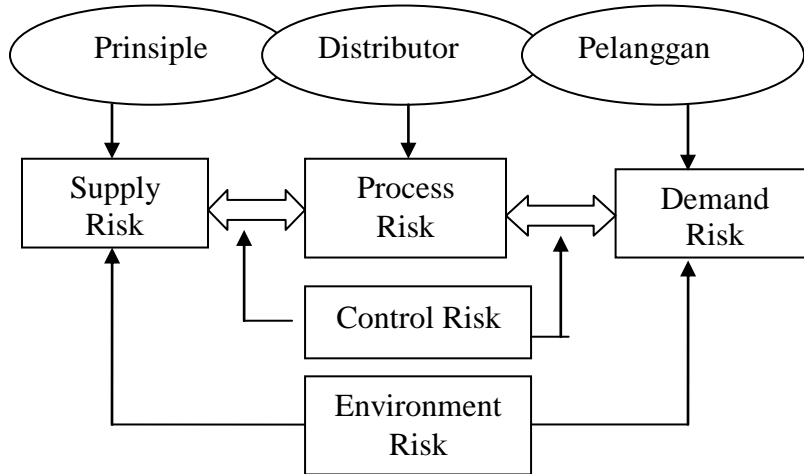
Sumber : Ditjen MIGAS 2007
Gambar 1.3 : Tabung Gas Elpiji 3 Kg

Dari peristiwa tersebut di atas, dapat disimpulkan ***bahwa pelanggan atau konsumen gas elpiji ukuran 3 Kg masih ada yang belum menggunakan gas tersebut sebagai akibat sistem pendistribusian yang tidak merata.***

Sesuai dengan pengamatan dari data yang diperoleh pada sistem rantai pasok gas elpiji 3 kg, penulis menyimpulkan terdapat 5 (lima) pemicu faktor risiko. Faktor-faktor yang dimaksud meliputi : informasi, transportasi, pola konsumsi masyarakat, pembangunan (terutama sektor industri) dan laju inflasi. Memahami kondisi tersebut di atas, maka organisasi/perusahaan perlu memberikan perhatian terhadap kemungkinan timbulnya risiko, juga melakukan tindakan persiapan mitigasi.

Dan hasil dari proses mengelola risiko merupakan salah satu referensi/acuan dalam pengambilan keputusan menjalankan organisasi/perusahaan bagi para manajemen (pemangku kekuasaan) di atas. Berdasarkan kenyataan ini, penulis tertarik untuk menganalisa sistem monitoring dan mitigasi rantai pasok gas elpiji 3 kg mulai dari Prinsip, Distributor dan Konsumen dengan mengevaluasi risiko yang akan terjadi supaya performansi yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan sehingga program konversi secara keseluruhan dapat terlaksana dengan baik. Dan

gambaran rantai pasok dan risikonya dapat dilihat seperti pada gambar 1.4 di bawah ini.



Gambar 1.4 : Risiko pada Rantai Pasok

1.2. Perumusan Masalah :

Sehubungan dengan persoalan tersebut di atas, maka masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi risiko sistem distribusi gas elpiji pada Pertamina wilayah Pemasaran III Jawa Barat.
2. Bagaimana menentukan langkah-langkah sistem monitoring risiko dan sistem mitigasi distribusi gas elpiji di wilayah Regional Pemasaran III Pertamina Jawa Barat

1.3 Tujuan Penelitian :

Sehubungan dengan tujuan dari manajemen rantai pasok adalah bagaimana mengharm oniskan hubungan antara simpul distribusi agar produk/jasa bisa sampai di komunitas pengguna secara tepat waktu dan tepat jumlah, dan berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh hasil evaluasi risiko sistem distribusi gas elpiji pada Pertamina wilayah Pemasaran III Pertamina Jawa Barat.
2. Memperoleh langkah-langkah sistem monitoring risiko dan sistem mitigasi distribusi gas elpiji di wilayah pemasaran III Pertamina Jawa Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh jika tujuan tercapai antara lain :

- A. Manfaat secara teoritis / keilmuan meliputi :

1. Mampu melacak kelemahan pengendalian yang melalui proses evaluasi dan perbaikannya.
2. Mampu mengetahui kelemahan pengendalian yang teridentifikasi dengan semestinya.
3. Dapat mengetahui hasil audit eksternal terhadap efektivitas sistem monitoring manajemen risiko.

B. Manfaat secara praktis meliputi :

1. Bisa memperkecil terjadinya risiko terutama setelah diadakannya sosialisasi terhadap masyarakat.
2. Terpenuhinya pelayanan akan kebutuhan gas elpiji bagi masyarakat .

C. Bagi perusahaan PT. Pertamina (Persero) dan pemerintah menjadi bahan masukan dan evaluasi dalam pengambilan keputusan dari kebijakan Konversi Minyak Tanah ke Gas.

1.5 Pembatasan dan asumsi

Untuk mencari solusi dari suatu permasalahan maka diperlukan batasan serta asumsi, dengan tujuan agar dapat memberikan arah serta mempermudah dalam proses penyelesaian masalah, sehingga dapat dilakukan analisis sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini, antara lain :

1. Masalah data keuangan terbatas (tidak termasuk hourly rate).
2. Visi, misi, serta strategi perusahaan dianggap sudah memadai sehingga dapat digunakan sebagai dasar penelitian.
3. Selama pelaksanaan penelitian diasumsikan tidak terdapat perubahan sistem manajemen yang berarti.
4. Analisis dengan metoda VaR outputnya hanya untuk melihat seberapa besar potensi risiko yang akan terjadi dan tidak sampai ketahapan analisis keuangan.

1.6 Lokasi

Penelitian analisis risiko distribusi gas elpiji 3 kg ini dilakukan di perusahaan PT. Pertamina Unit III Pemasaran Jl. Surapati Bandung.

1.7 Sistematika Penelitian,

BAB I: PENDAHULUAN

Berisi penjelasan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup permasalahan, serta manfaat penelitian

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab II berisi tentang teori-teori serta model yang digunakan untuk pemecahan masalah.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab III berisi penjelasan tentang objek dan tempat penelitian, desain dan teknik penelitian, teknik pengumpulan data dan informasi, serta perumusan masalah.

BAB IV : PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Bab IV berisi penjelasan tentang data yang dikumpulkan dan pengolahan data untuk memecahkan masalah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam bab III.

BABV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab V berisi tentang analisis dan pembahasan dari hasil pemecahan masalah.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab VI berisikan tentang kesimpulan yang merupakan jawaban atas pemecahan masalah yang telah dirumuskan pada perumusan masalah